



PEMBERDAYAAN EKONOMI KOMUNITAS MUSLIM (STUDI PADA MAJELIS TA'LIM AL- MUTHMAINNAH DI KABUPATEN PONOROGO)

Silvina Choirotul Fahmi

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: silvinanino@gmail.com

Luhur Prasetyo

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: elprasetyo@yahoo.co.id

Abstract

The objective of this study is to describe the patterns and strategies of society economic empowerment that are used by the management of the Islamic Board of Trustees and empowerment is ongoing before and after conducting empowerment. Besides, it describes the factors that influenced the empowerment activity. These three problem formulations were examined with the theory of society empowerment and social change because it related to changes that occur in society. The study was conducted in Pohijo, Sampung, Ponorogo. This study adopts a qualitative approach through field research on productive activities for a society based on data collected by interviews, observation, and document analysis. This study describes the results of this empowerment activity in terms of culinary, society can make pentol and meatballs with good taste. In terms of animal husbandry, society can breed goats properly so that the number of goats is increasing every year. In terms of agriculture, society can grow shallots with a good method, so that the harvest never fails. A Changing in attitudes and habits of the society from the results achieved from society empowerment activities have more helped the economy of the Talim Assembly congregation, especially empowerers.

Abstrak

Tulisan bertujuan mengungkap pola dan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digunakan oleh pengurus Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah di Desa Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogodan pemberdaya

sebelum, sedang berlangsung dan sesudah melakukan pemberdayaan serta mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan pemberdayaan ini. Sesuai dengan tujuan tersebut, data dikaji menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dan perubahan sosial karena berhubungan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Studi dilakukan di Desa Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan tentang kegiatan yang produktif bagi masyarakat berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Studi ini mengungkapkan hasil dari kegiatan pemberdayaan ini yakni dari segi kuliner, masyarakat mampu membuat pentol dan bakso dengan citarasa yang enak. Dari segi peternakan, masyarakat mampu berternak kambing dengan baik hingga kian tahun kian bertambah jumlah kambingnya. Dari segi pertanian, masyarakat mampu bertanam bawang merah dengan metode yang baik sehingga setiap kali panennya tidak pernah gagal. Perubahan sikap serta kebiasaan masyarakat dari hasil yang sudah dicapai dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sedikit banyak sudah membantu perekonomian jama'ah Majelis Ta'lim khususnya pemberdaya.

Keyword: Pemberdayaan Masyarakat, Perubahan Sosial, Majelis Ta'lim

PENDAHULUAN

Pembangunan tidak hanya mengakibatkan perubahan positif dan kesejahteraan tetapi juga mengakibatkan perubahan negatif.¹ Suatu realitas yang nampak jelas dalam proses pembangunan nasional di Indonesia selama ini adalah bahwa perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam upaya pembangunan selalu merefleksikan kebijakan politik yang digariskan dari atas ke bawah. Kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam berbagai program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah tanpa mengundang partisipasi masyarakat. Pembangunan yang seperti itu tampak lebih sebagai proses politik dan ekonomi, daripada sebagai suatu proses sosial budaya yang mencerminkan keberdayaan masyarakat. Pembangunan ini tidak mendukung warga masyarakat khususnya yang bermukim di daerah pedesaan. Mereka sering dibiarkan tertinggal di belakang, tersingkir sampai ke pinggir.²

Masalah-masalah yang sering muncul di negara Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan sudah lama terjadi dan belum ada solusi yang

¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 59.

² Sriharini, "Pembangunan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembangunan Berkelanjutan," *JURNAL PMI : Media Pemikiran Dan Pengembangan Masyarakat* 4, no. 1 (2006).

tepat. Dalam menyikapi kegagalan-kegagalan yang sering dialami oleh pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan, muncul gerakan-gerakan sosial yang mengatasnamakan masyarakat lapisan bawah. Mereka fokus pada pengembangan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat dan peningkatan kualitas hidup manusia atau peningkatan harkat dan martabat manusia. Melalui proses pendampingan masyarakat, mereka dapat belajar mengenali kelemahannya dan mengembangkan kemampuannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi.³

Sebagai wujud kongkrit dari gerakan sosial itu, mereka membuat suatu strategi pembangunan masyarakat di negara-negara sedang berkembang. Salah satunya adalah adanya Majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim merupakan bentuk dakwah Islam yang dalam kegiatannya menyerupai kumpulan pengajian yang diselenggarakan atas dasar kebutuhan untuk memahami Islam disela-sela kesibukan bekerja dan bentuk-bentuk aktivitas lainnya atau sebagai pengisi waktu bagi ibu-ibu rumah tangga.⁴ Adanya majelis ta'lim di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk menambah ilmu dan keyakinan agama Islam yang akan mendorong pengalaman ajaran agama, sebagai ajang silaturahmi anggota masyarakat, dan untuk meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya.⁵

Pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan sebuah cita-cita besar tentang maksimalisasi fungsi majelis ta'lim sebagai wadah pemberdayaan untuk kesejahteraan umat Islam. Pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh banyak pihak, termasuk di antaranya berbasis majelis.⁶ Salah satu daerah yang berpotensi dan dinilai melakukan pemberdayaan ekonomi umat adalah masyarakat di Desa Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten

³ Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), 5.

⁴ Khozin, *Jejak-Jejak Pendidikan Islam Di Indonesia* (Bandung: Penerbitan Muhammadiyah Malang, 1996), 236.

⁵ Helmawati, *Pendidikan Nasional Dan Optimalisasi Majelis Ta'lim* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 79.

⁶ Robiatul Auliyah, "Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan," *Jurnal Studi Manajemen* 8, no. 1 (2014); Trisnawati, "Community Development for Coastal Society Based on Islamic Values in Tanjung Village Pademawu Pamekasan," *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 25, no. 1 (2017); Azis Muslim, "Economic Community Empowerment Through Tourist Village Development," *Mimbar* 32, no. 2 (2016); Imamul Hakim, "Muhammadiyah's Framework on The Community Economic Empowerment," *Falah Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2018).

Ponorogo melalui Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah. Majelis ini terletak di perbatasan kota Magetan, Wonogiri dan Ponorogo.

Desa Pohijo merupakan desa yang padat penduduk dan berpotensi dilakukan program pemberdayaan masyarakat, khususnya dibidang ekonomi. Sampai saat ini, Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah telah melaksanakan pemberdayaan ekonomi jamaahnya melalui kuliner atau makanan, yaitu pembuatan pentol bakso yang setiap hari dibuat dan dijual oleh jamaah dari majelis ta'lim dengan menyewa kios. Selain itu, di bidang peternakan, majelis ta'lim mampu membeli kambing sebanyak 4 ekor yang dipelihara oleh anggota jamaah dan saat ini jumlahnya sudah berkembang mencapai 10 ekor. Sementara, di bidang pertanian, jamaah majelis ta'lim diberdayakan melalui pertanian bawang merah yang panen setiap 60 hari sekali, dengan bibit 4kg menghasilkan 60kg setiap kali panennya. Pemberdayaan masyarakat dalam menyingkronkan bentuk nilai sosial dan budaya di Ponorogo tentu menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Strategi yang tepat tentu berbeda dengan daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi dan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digunakan oleh pengurus Majelis Ta'lim dan pemberdaya dalam melakukan pemberdayaan serta menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan pemberdayaan ini.

PEMBERDAYAAN EKONOMI KOMUNITAS MUSLIM MELALUI MAJELIS TA'LIM AL-MUTHMAINNAH

Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.⁷ Pemberdayaan merupakan suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian "proses" menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahanan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude* maupun *practice* menuju

⁷ Sunan Autad Sarjana and Iza Hanifudin, "Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik: Sebuah Alternatif Pemberdayaan Tanah Wakaf," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 12.

pada penguasaan pengetahuan, sikap perilaku, sadar dan kecakapan serta keterampilan yang baik, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁸Pemberdayaan menuntut adanya perubahan dalam banyak aspek dalam masyarakat. Pemberdayaan melibatkan apa yang disebut dengan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk dapat menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya.⁹

Kegiatan pemberdayaan tentu memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Menurut Sulistyani, tujuan pemberdayaan adalah membantu pengembangan dari masyarakat lemah, renta, miskin, marjinal dan kelompok wanita yang didiskriminasi atau dikesampingkan. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat.¹⁰ Sementara, menurut Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat, ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya bertujuan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui

⁸ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Lihat juga Ahmad Natsir, Hawwin Muzakki, and Muchlis Daroini, "Posdaya Berbasis Pesantren: Pelatihan Manajemen Madrasah Dan Pengelolaan Kelas Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an 'Hasan Munadi Pohsawit' Ponorogo," *Indonesian Engagement Journal*, vol. 1, November 2, 2020, <https://doi.org/10.21154/INEJ.V1I2.2329>.

⁹ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 175.

¹⁰ Sulistyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Gava Media, 2004), 79.

peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.¹¹

Secara umum, ada dua model kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu model *top down* dan model *bottom up*. Model *top down* cenderung menggunakan logika berpikir dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Selain itu, pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan *policy centered* karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha memperoleh fakta apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak.¹² Artinya dalam model pemberdayaan melalui pendekatan *topdown*, sasaran pemberdayaan hanya menjadi objek sasaran dari yang akan menerima dan menikmati hasil pemberdayaan dilakukan oleh pihak luar dari sekumpulan obyek pemberdayaan.

Model *top down* mempunyai kelebihan dimana proses pembangunan dapat berjalan cepat, dan target-target yang telah ditetapkan dapat dicapai tepat pada waktunya. Nyatanya, posisi sentral yang mendominasi proses pembangunan ternyata dapat melemahkan masyarakat dan menimbulkan hubungan yang timpang (tidak serasi). Disatu pihak lahir budaya “perintah” dikalangan pelaksana pemberdayaan, di lain pihak akan lahir sikap “diam dan menunggu”.¹³ Secara garis besarnya, kegiatan pemberdayaan *top down* dapat dikategorikan menjadi 2(dua) fase, yaitu perencanaan dan pelaksanaan.

Kelemahan model *top down*: *pertama*, program-program kesejahteraan yang didesain dibiayai dan dikelola secara sentralistis ini memerlukan biaya yang sangat mahal untuk dapat berhasil, lebih dari apa yang dapat ditanggung oleh birokrasi. *Kedua*, program-program kesejahteraan semacam ini terlalu menguntungkan pelaksanaannya pada manajemen birokrasi yang kaku dan tidak lentur, yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya, rakyat harus menyesuaikan diri dengan apa yang akan diberikan oleh birokrasi. Konsep *top down* kurang

¹¹ Agus Ahmad Syafe'i, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2001), 39.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 34.

¹³ Payne, *Modern Social Work Theory* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 204.

memperoleh partisipasi masyarakat, karena rakyat tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.¹⁴

Sementara, model *bottom up* adalah suatu model yang mencoba melakukan koreksi dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada model pemberdayaan *top down*. Model pendekatan yang kedua ini memakai konsep “partisipasi” sebagai kata kunci. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan atau dalam pengambilan keputusan. Model pendekatan *bottom up* dalam kegiatan pemberdayaan merupakan suatu pengkondisian dengan mengedepankan partisipasi masyarakat atau klien dalam setiap tahap kegiatan pemberdayaan dan mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pemberdayaan. Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama oleh masyarakat. Sejumlah nilai dan sistem dipahami bersama. Model *bottom up* dimulai dengan situasi dan kondisi serta potensi lokal. Dengan kata lain, model kedua ini menempatkan manusia sebagai subyek. Pendekatan *bottom up* lebih memungkinkan penggalan dana masyarakat untuk pembiayaan pemberdayaan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa memiliki dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pemberdayaan, yang notabene memang untuk kepentingan mereka sendiri.¹⁵

Bottom up Planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan, menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian kegiatan pemberdayaan, *bottom up planning* atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri dan pemberdayanya sebagai fasilitator.¹⁶

Pendekatan bawah ke atas (*bottom-up*) ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Kelemahannya adalah memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk perencanaan. Diperlukan pengembangan budaya perusahaan yang sesuai. Kemudian, pada pelaksanaannya, model

¹⁴ Sujarwo, *Strategi Pembelajaran Orang Dewasa* (Jakarta: Pemakalah Dosen Jurusan PLS FIP UNY, n.d.), 35.

¹⁵ Payne, *Modern Social Work Theory*.

¹⁶ Payne.

bottom up menggunakan paradigma pembelajaran andragogi yang langkah-langkahnya menurut Knowles antara lain bahwa hubungan belajar dengan pengajar merupakan hubungan saling membantu yang timbal balik. Pengalaman belajar orang dewasa dinilai sebagai sumber belajar yang kaya multi komunikasi oleh semua peserta pengajar maupun pelajar. Pelajar perlu mempelajari berdasarkan pada persepsi mereka sendiri terhadap tuntutan situasi sosial mereka, Tempat belajar merupakan proses untuk penemuan masalah dan pemecahan masalah pada saat itu juga pendekatannya (*problem centered*).¹⁷ Pada model ini, komunitas adalah aktor dalam kegiatan pelatihan. Teknik komunikasi yang dilakukan pada pendekatan ini menggunakan teknik komunikasi dua arah, dimana peserta lebih aktif dalam kegiatan pelatihan.

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras, yaitu aras mikro, aras mezzo dan aras makro. Aras mikro adalah pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered aproach*). Sementara, aras mezzo adalah pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan serta dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Di sisi lain, aras makro adalah pendekatan yang disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri untuk memilih dan menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Pohijo Melalui Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah

Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak

¹⁷ Sujarwo, *Strategi Pembelajaran Orang Dewasa*.

yang kurang atau belum berdaya.¹⁸ Maka pengertian pola pemberdayaan adalah pola atau ragam yang digunakan untuk proses menuju berdaya yang diberikan dari pihak yang memiliki daya ke pihak yang kurang berdaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Suyanto,¹⁹ penanggung jawab Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah, pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pengurus Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah dalam rangka membangun kesadaran ekonomi masyarakat adalah, *pertama*, kegiatan penyadaran dilakukan oleh pengurus Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah yang ditujukan untuk masyarakat Desa Pohijo dan sekitarnya agar memiliki motivasi untuk berpartisipasi mengembangkan usaha ekonomi. Kegiatan ini dimulai dengan menyadarkan masyarakat Desa Pohijo dan sekitarnya tentang potensi yang dimiliki oleh desa melalui masyarakat, sehingga dapat dikembangkan menjadi desa yang produktif dengan potensi yang dimiliki. Diharapkan hal tersebut akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya memberikan motivasi dan arahan kepada masyarakat, Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah mengadakan suatu pertemuan sebagai proses awal untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dan masyarakat lah yang menjadi subjek dalam pengembangan tersebut.

Kedua, dengan penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas yaitu memberikan daya atau kuasa. Masyarakat harus mampu terlebih dahulu. Dalam artian masyarakat sudah memiliki keterampilan atau potensi sehingga dapat digali dalam kegiatan ini. Kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan sengaja untuk memberikan daya dari satu kelompok ke kelompok yang lain yang membutuhkan daya. Masyarakat yang dimaksud disini adalah peserta. Peningkatan kapasitas dapat diberikan melalui pelatihan, workshop, atau konsultasi secara individual. Pelaksanaan pelatihan dilihat dari konsep pelatihan sebagai proses pemberdayaan merupakan sebuah proses secara kolektif sebagai media intervensi pengetahuan dan keterampilan yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan sikap untuk memecahkan masalah.

Ketiga, pendayaan. Pendayaan adalah pemberian daya dan kekuatan kepada target yang disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang dimiliki masyarakat. Masyarakat diberikan daya dengan memberikan kesempatan sesuai dengan potensinya masing-masing. Majelis Ta'lim

¹⁸ Maskuri Bakri, *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan RRA Dan PRA* (Surabaya: Visipress Media, 2017), 17–18.

¹⁹ Suyanto, wawancara, Ponorogo, tanggal 20 Januari 2020.

Al-Muthma'innah selaku fasilitator hanya menyiapkan dana, lahan serta peralatan yang dibutuhkan untuk berjualan bakso, menanam bawang merah dan untuk berternak kambing. Selebihnya masyarakat yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan itu sendiri.

Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi melalui Majelis Ta'lim diperlukan adanya model atau pola yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pengurus Majelis Ta'lim. Seperti yang telah dikemukakan diatas pola pemberdayaan dilakukan untuk memudahkan mencapai tujuan pemberdayaan yang ditujukan masyarakat. Melalui pola pemberdayaan yang dirancang secara jelas, proses pemberdayaan juga akan terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan untuk mencapai keberhasilan.

Pola pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pohijo melalui Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah yaitu dengan pendekatan *bottom-up* berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri. Pendekatan *bottom-up* atau yang sering disebut dengan pendekatan partisipatif adalah proses penyusunan perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa bersama lembaga kemasyarakatan desa dan melibatkan berbagai unsur terkait dalam masyarakat.

Implementasi pendekatan *bottom-up* dalam kegiatan pemberdayaan di Desa Pohijo ternyata dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa dan masyarakatnya. Program-program pemberdayaan yang perencanaannya disusun dengan pendekatan *bottom-up* selalu dapat diterima dan mendapat dukungan partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaannya, baik berupa sumbangan dana/material maupun tenaga. Ini dapat dimaknai bahwa perencanaan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat secara *bottom-up* efektif mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan di desa mereka.

Sebagaimana hasil penelitian Bryant Corralie dan Louise White (1985) yang mengemukakan bahwa pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan desa sangat efektif karena: (1) melalui pendekatan *bottom-up* masyarakat dapat memberi tanggapan, jawaban atau *feed-back* kepada pihak pemerintah mengenai hal-hal menyangkut jawaban, tanggapan, laporan, keluhan dan lainnya. (2) Melalui pendekatan *bottom-up* masyarakat dapat mengemukakan dan menyalurkan aspirasi, permintaan atau tuntutan kepada masyarakat. (3) Melalui pendekatan *bottom-up* dapat terjadi tawar-menawar, permufakatan atau kerjasama

antara masyarakat dan pemerintah. (4) Melalui pendekatan *bottom-up* dapat terjadi proses *exchange* antara masyarakat dan pemerintah.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa implementasi pendekatan *bottom-up* dalam mengembangkan desa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat secara baik dan benar akan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi. Artinya, semakin baik implementasi pendekatan *bottom-up* dalam pengembangan desa, maka akan semakin mendorong partisipasi masyarakat dalam bergerak menuju perubahan yang lebih baik.

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Pohijo Melalui Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus.²¹ Sedangkan menurut Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafi'i, strategi adalah rencana-rencana atau langkah-langkah yang akan ditempuh dalam upaya memecahkan suatu masalah yang tengah di hadapi. Kata strategi tentu bukan (*statement*) yang bersifat menggeneralisir bisa digunakan oleh siapa saja dalam menghadapi persoalan yang ada.²² Strategi pemberdayaan adalah suatu cara dalam mengoptimalkan upaya-upaya pemberdayaan yaitu dengan cara mengangkat dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut dalam rangka memperbaiki taraf kehidupan.

Pemberdayaan masyarakat adalah perwujudan dari pengembangan kapasitas masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdaya manusia agar paham dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peran di masyarakat. Perlunya upaya pemberdayaan adalah berangkat dari kenyataan masih lemahnya posisi sebagian besar masyarakat dalam menuntut hak dan menjalankan kewajibannya ditunjukkan dengan kurangnya akses mereka terhadap beberapa fasilitas, misalnya informasi, teknologi, permodalan usaha, hukum, dan apalagi kemampuan kontrol. Berbagai kelemahan akses tersebut diawali dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat, terutama di pedesaan. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya

²⁰ Riedel Legi, W.Y. Rompas, and Jericho D. Pombengi, "Implementasi Pendekatan Buttom-Up Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Pembangunan* 1, no. 10 (2015): 59.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi Kelima 2016-2020.

²² Nanih Machendrawaty and Agus Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 97.

kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas menggunakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan serta bebas dari kebodohan. Kemampuan menjangkau sumber-sumber produktif dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Mereka juga bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²³

Beragam strategi yang terurai dalam kegiatan dapat dilaksanakan untuk memotivasi masyarakat menemukan potensi diri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pengembangan kapasitas masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dapat diupayakan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan berbagai potensi yang ada di masyarakat Desa Pohijo.

Strategi pemberdayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pohijo melalui Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edi Suharto yaitu strategi dengan Aras Mezzo. Strategi aras mezzo adalah pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Strategi pada pemberdayaan masyarakat di Desa Pohijo ini antara lain meliputi program pelatihan bercocok tanam bawang merah, pelatihan berternak kambing serta memasak bakso.

Apabila dilihat dari aras mezzo, tujuan dari kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan tersebut adalah untuk membekali masyarakat dengan keahlian agar mampu hidup mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain.

a. Strategi yang Dilakukan Pengurus Majelis Talim Al-Muthmainnah Pra Pemberdayaan

Sebelum memutuskan untuk menambah kegiatan dalam Majelis Talim, penanggung jawab Majelis Ta'lim serta pengurus melakukan musyawarah apa saja langkah nyata strategi yang harus di lakukan

²³ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*.

sebelum kegiatan pemberdayaan berlangsung. Berikut langkah yang dilakukan sebelum kegiatan pemberdayaan antara lain yakni:

Pertama, membuat sistem kelembagaan yang kuat, yakni membuat program kegiatan yang disepakati secara bersama anggota Majelis Ta'lim, meningkatkan kepercayaan diri dengan kemampuan yang baik dalam menyampaikan saran dan masukan yang membangun strategi itu juga diharapkan dapat membuat aturan main yang khas dan baku serta dicatat untuk disepakati sebagai arah kegiatan Majelis Ta'lim.

Kedua, merancang kegiatan ekonomi produktif yang disesuaikan dengan sumber daya local, seperti praktek bertanam bawang merah, praktek memasak bakso/ pentol serta berternak kambing dengan memanfaatkan modal finansial yang telah ada, mengingat adanya sumber dana yang berasal dari anggota maupun sumbangan-sumbangan yang berasal dari berbagai donatur juga menjadi kekuatan bagi Majelis Ta'lim dalam menunjang program-program yang telah ada. Sumberdana yang beragam dan tetap ada ini dapat dijadikan sebagai modal awal dalam menjalankan usaha ekonomi produktif.

Ketiga, menyiapkan bahan pokok yang dibutuhkan dalam kegiatan pemberdayaan, seperti pada pemberdayaan bawang merah, pengurus menyiapkan bibit bawang merah, lahan untuk menanam bawang merah serta irigasi air untuk menyiram bawang merah. Pada pemberdayaan kambing, pengurus juga harus menyiapkan pakan dan obat untuk kambing serta lahan untuk membuat kandang kambing. Pada pemberdayaan bakso, pengurus juga harus menyiapkan tempat untuk berjualan bakso.

b. Strategi yang Dilakukan Pengurus Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah Pada Waktu Kegiatan Pemberdayaan Berlangsung

Setelah berlangsung kegiatan pemberdayaan di Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah, penanggung jawab beserta pengurus selalu melakukan inovasi baru agar pemberdayaan lebih berkembang dan tidak mati. Berikut langkah yang dilakukan pengurus dalam memperbaiki pemberdayaan, antara lain:

Pertama, peningkatan mutu dan kuantitas pendidikan serta kegiatan pendampingan. Peningkatan pendidikan merupakan suatu usaha untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan masyarakat sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. Pendidikan tidak harus bernuansa formal, tetapi juga dituangkan sebagai pendekatan pendidikan non

formal. Misalnya melalui pelatihan, praktek lapangan, magang, studi banding, dan lain-lain.

Kedua, peningkatan mutu dan frekuensi penyuluhan. Penyuluhan adalah salah satu dari contoh pendidikan non formal yang pembahasannya sangat fleksibel (d disesuaikan dengan kebutuhan sasaran), penyuluhan diterapkan dengan sistem pendidikan orang dewasa dengan sarasannya adalah orang-orang yang sudah mempunyai banyak pengalaman di bidangnya. Sejauh pengamatan peneliti, strategi peningkatan mutu dan frekuensi penyuluhan bagi masyarakat desa Pohijo melalui Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum sepenuhnya dikembangkan, hal ini dapat dianalisa dari keterlibatan pemerintah desa untuk berperan menghadirkan petugas tenaga penyuluh pertanian dari pemerintah kabupaten.

Ketiga, penguatan kelembagaan. Langkah-langkah pemberdayaan kelembagaan anggota pemberdaya sebagai suatu upaya perubahan sosial diawali dengan dilakukan pertemuan rutin anggota setiap satu bulan sekali di akhir bulan. Hal ini dilakukan agar terjadi koordinasi antar anggota dan saling tukar informasi, dari pengurus hingga semua anggota-anggota pemberdaya. Selain menyampaikan informasi, dalam pertemuan rutin juga *sharing* tentang masalah yang dihadapi pemberdaya mulai dari masalah promosi penjualan, kondisi alam dan yang lainnya.

Keempat, penyebaran informasi. Informasi dimaksud contohnya berkaitan dengan produk unggulan, sumber-sumber bahan baku, dan informasi pemasaran. Kelemahan masyarakat adalah lemah dalam mengakses informasi yang sebenarnya sudah tersedia di lingkungan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh motivasi masyarakat yang rendah untuk mengakses informasi tersebut atau keterbatasan masyarakat karena minimnya informasi mengenai media sosial. Dalam kasus ini, pemberdayaan dapat diupayakan dengan kampanye pentingnya informasi bagi masyarakat.

c. Efektifitas Strategi Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Pengurus dan Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah di Desa Pohijo

Efektifitas dari kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Desa Pohijo melalui Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah dapat dilihat melalui perubahan sikap dan perilaku yang dialami oleh masyarakat setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, apakah mengalami perubahan

sosial atau tidak. Efektivitas dianalisis melalui tiga aspek, yakni aspek kognitif (pengetahuan), aspek afektif (sikap) dan aspek psikomotorik (kecenderungan bertindak).²⁴ Berikut efektifitas yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Pohijo melalui Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah:²⁵

1) Aspek Kognitif

Dalam aspek kognitif, efektifitas dapat dilihat dari hasil atau tingkat pengetahuan yang diperoleh dari pemateri dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pohijo melalui Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa pemberdaya mengenai materi dalam pelatihan serta dalam praktek yang diberikan oleh pengurus Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah selama kegiatan pemberdayaan berlangsung. Dalam hal ini aspek kognitif dinilai melalui beberapa indikator, yaitu jenis bawang merah, bagaimana cara menanam bawang merah dari penanaman pupuk, menyiram hingga panen. sebagian kecil pemberdaya yang faham sebelum pemberdayaan ini dilakukan, setelah pelatihan dan praktek langsung pemberdaya sedikit banyak langsung faham cara yang tepat bertanam bawang merah hingga panen.

Untuk bakso yakni apa saja bahan-bahan pembuat bakso, bagaimana cara membuat adonan bakso hingga cara memasak bakso yang tepat. Mayoritas pemberdaya hanya bisa cara memasak bakso saja namun untuk membuat adonan sedikit dari jumlah pemberdaya yang faham cara manual membuat adonan bakso. Setelah mengikuti pelatihan membuat bakso pemberdaya bisa cepat menangkap bagaimana langkah awal pembuatan hingga akhir.

Untuk kambing yaitu bagaimana cara merawat kambing, dari membantu melahirkan anak, memberi makan minum, memandikan kambing dan menjaga tubuh kambing tetap sehat. Kambing merupakan makhluk hidup sama seperti manusia, butuh makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Maka dalam perawatan kambing harus lebih ekstra ketimbang pemberdayaan yang lainnya.

²⁴ Hawwin Muzakki, *SISTEM PENILAIAN PEMBELAJARAN Teori Dan Praktik* (Malang: Madani Media, 2019).

²⁵ Trisnawati dalam tulisannya membagi menjadi empat aspek, yaitu kognitif, konatif, afektif, dan psikomotorik. Sementara, dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan aspek konatif dan afektif. Lihat Trisnawati, "Community Development for Coastal Society Based on Islamic Values in Tanjung Village Pademawu Pamekasan."

2) Aspek Afektif

Dalam aspek afektif, efektifitas dapat dilihat dari perubahan sikap dan perilaku pemberdaya setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa pemberdaya mengenai perasaan setelah mengikuti program pemberdayaan masyarakat, dorongan perubahan sikap dan kemauan berbagi informasi dengan apa yang sudah diperoleh selama melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dari beberapa pemberdaya, mayoritas mendukung program pemberdayaan ini. Hal ini menunjukkan tingkat afektif yang menerima kegiatan ini tinggi, hal ini didukung perasaan senang selama mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Selain itu pemberdaya yang mengikuti kegiatan pembuatan bakso dengan senang hati berbagi informasi kepada tetangga atau keluarga yang tidak mengikuti kegiatan pemberdayaan tersebut agar sama-sama bisa.

3) Aspek Psikomotorik

Dalam aspek psikomotorik, efektifitas dapat dilihat dari keterampilan yang di peroleh selama mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh desa Pohijo Melalui Majelis Ta'lim. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa pemberdaya mengenai siapa saja yang tidak mendapatkan ketrampilan, yang tidak menanam bawang merah, tidak membuat adonan bakso dan tidak memberi makan minum kambing. Namun hampir semua pemberdaya mengatakan mereka semua diberi kesempatan untuk mengikuti dari awal pemberdayaan hingga akhir dan di dampingi penanggung jawab dari kegiatan ini. Hampir semua pemberdaya penerima program pemberdayaan masyarakat memiliki keterampilan dalam membuat adonan bakso, menanam bawang merah dan berternak kambing sesuai dengan apa yang sudah diajarkan pada pelatihan selama kegiatan pemberdayaan.

Jadi pemberdayaan masyarakat di Desa Pohijo melalui Majelis Ta'lim cukup efektif terhadap perubahan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Perubahan masyarakat terhadap sikap dan perilaku yang sudah berubah lebih baik antara lain, mereka sudah bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari program pemberdayaan, interaksi sosial antar jama'ah yang notabene terdiri dari 3 kabupaten yakni Kabupaten Magetan, Kabupaten Purwanto dan Kabupaten Ponorogo juga semakin

erat. Peggalian potensi yang dimiliki desa maupun masyarakat semakin terlihat dan keluar.

Peningkatan percaya diri masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang timbul akibat pengangguran dan kemiskinan serta kemampuan komunikasi masyarakat dalam forum pembangunan terlihat semakin baik. Kondisi itu muncul akibat kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pohijo melalui Majelis Ta'lim serta adanya forum musyawarah di desa dan kecamatan yang dapat menjadi sarana membina komunikasi diantara masyarakat.

Menurut Edi Suharto, pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan diatas telah dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5 P, yaitu:

Pertama, *pemungkinan*, yaitu kondisi fisik sudah sangat mendukung. Desa Pohijo memiliki tanah yang subur dan irigasi air yang lancar dan hal ini menunjang dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dukungan dari faktor internalnya, yakni masyarakatnya sendiri ikut berpartisipasi dan antusias dalam mengikuti kegiatan. Ini menjadi potensi untuk berkembang.

Kedua, *penguatan*, yaitu Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah juga sudah memperkuat pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi secara langsung dan menanyakan masalah mayoritas jamaah itu apa dan berusaha mencari solusi yang tepat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan masalah yang dihadapi jamaah yang mengeluh dengan perekonomian mereka.

Ketiga, *perlindungan*, yaitu Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah juga melindungi masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang lemah agar tidak tertindas dengan kelompok yang kuat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Pohijo dilakukan dengan hati-hati dan penuh perlindungan dari Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah agar kegiatan ini berlangsung dengan nyaman antara pemberdaya dan pengurus Majelis Ta'lim. Pemberdayaan ini sepenuhnya dikelola dan digunakan oleh pemberdaya. Majelis Ta'lim hanya wadah dari berkembangnya masyarakat, jadi tidak ada pihak yang mengambil keuntungan diri sendiri.

Keempat, *penyokongan*, yaitu Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah memberikan sokongan berupa bimbingan atau pelatihan yang diberikan kepada pemberdaya secara gratis. Bimbingan dan pelatihan diberikan kepada pemberdaya sejak wacana akan diadakannya kegiatan

pemberdayaan hingga pendampingan pada saat praktek. Diharapkan dengan pemberdayaan ini masyarakat bisa lebih produktif dan mandiri.

Kelima, *pemeliharaan*, yaitu Majelis Ta'lim memberikan kesempatan serta keseimbangan dan keselarasan pada semua pemberdaya untuk belajar dan mencoba apapun yang diajarkan dalam pelatihan pemberdayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing pemberdaya. Hal ini membuat setiap pemberdaya berkesempatan berusaha yang sama agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Pohijo Melalui Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah

Dalam kegiatan pemberdayaan agar dapat mencapai sebuah keberhasilan dan mempunyai pengaruh terhadap pemberdayaan untuk masyarakat sekitarnya, tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung. Faktor-faktor pendukung tersebut yang membuat sebuah desa dapat terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik dan dapat mencapai sebuah tujuan bersama. Faktor pendukung dalam sebuah pelaksanaan program merupakan suatu kekuatan dari kegiatan yang diberikan.²⁶ Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pohijo adalah:

Pertama, tingginya partisipasi yang responsif dari masyarakat dengan mengikuti program-program yang sudah terjadwal. Terlihat jelas sejak wacana akan didirikan Majelis Ta'lim di Desa Pohijo, masyarakat Desa Pohijo sudah sangat menunggu hingga jadi dan beroperasi. Kegiatan demi kegiatan yang dilaksanakan disana juga berjalan dengan baik, terlihat jama'ahnya dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak. Masyarakat semakin antusias dengan dibentuknya kegiatan pemberdayaan yang ada pada Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah. Program ini dibentuk oleh pengurus dan anggota Majelis Ta'lim tak lain hanya untuk membantu menambah penghasilan masyarakat sekitar yang notabene mayoritas masyarakat berkerja sebagai buruh lepas atau serabutan dan petani. Apapun yang diberdayakan semuanya akan dikelola oleh anggota pemberdayaan dan akan kembali ke mereka lagi.

²⁶ Menurut Pratama, ada delapan faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan. Delapan faktor tersebut adalah 1) Peran serta pemerintah; 2) LSM; 3) Pendampingan; 4) Local Community Organization; 5) Koperasi; 6) Peran swasta; 7) Pendidikan; dan Partisipasi. Lihat Crisvi Pratama, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho Di Lereng Gunung Wilis," *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 1, no. 1 (2013): 13–14.

Kedua, kondisi fisik. Kondisi fisik Desa Pohijo yang berupa tanah yang subur dan suhu lingkungan yang cocok untuk usaha tani hortikultural yakni bawang merah dan ternak kambing cukup mendukung upaya pemberdayaan di Desa Pohijo. Suburnya tanah dan suhu lingkungan membuat hasil panen bawang merah lebih bagus dan bisa terjual cepat, sehingga hasil dari panen sudah cukup untuk menambah penghasilan masyarakat sebagai anggota pemberdayaan. Kualitas rumput dan tanaman untuk dimakan kambing pun juga bagus, sehingga kambing lebih sehat dan gemuk.

Ketiga, rasa persaudaraan antar jama'ah dan masyarakat. Sebagai contoh, sebagian dari jama'ah saling memberikan hasil panen mereka kepada Majelis Ta'lim yang membuat tali silaturahmi antar jama'ah dan masyarakat menjadi lebih erat. Biasanya jika terdapat jadwal rutin pengajian, hasil panen dari masyarakat diolah oleh anggota majelis ta'lim dan digunakan sebagai menu untuk jama'ah yang hadir dalam pengajian. Seperti dalam tradisi mereka, jika ada masyarakat yang berkumpul, disitu dapat dipastikan ada makanan tanpa adanya iuran atau giliran siapa saja yang ingin memberi. Tradisi berbagi khas orang Jawa yang jelas masih kental di desa ini membuat eratnya silaturahmi dan banyaknya anggota Majelis Ta'lim.

Keempat, adanya tuntutan para jama'ah dan anggota pemberdayaan untuk mengadakan pelatihan yang menunjang kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat di Majelis Ta'lim. Tingginya keinginan masyarakat untuk terus belajar bagaimana cara memberdayakan dengan baik dan benar membuat usaha ekonomi Majelis Ta'lim semakin berkembang. Tujuan dari kegiatan pemberdayaan ini tak lain Majelis Ta'lim ingin berbagi ketrampilan dan menambah wawasan masyarakat dalam berternak kambing, bertanam bawang merah dan membuat adonan bakso yang enak. Di samping menambah penghasilan anggota pemberdayaan, masyarakat nantinya dapat bergerak secara mandiri dengan usahanya sendiri.

Kelima, letak Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah yang strategis serta waktu yang kondisional. Majelis Ta'lim ini berada di perbatasan tiga kabupaten, tepatnya perbatasan Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Wonogiri, sehingga membuat masyarakat tidak jauh-jauh dalam mencari pekerjaan. Selain dapat mengerjakan pekerjaan utamanya, masyarakat dapat melakukan kegiatan tambahan, seperti berternak kambing dan bertani bawang merah. Masyarakat merasa tidak direpotkan dengan jarak rumah mereka dengan Majelis Ta'lim.

Keenam, adanya dukungan dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah, dalam hal ini RT, RW dan kepala desa serta pemerintah pusat memberikan dukungan dalam kegiatan pemberdayaan ini dengan memberikan bantuan dana untuk kelancaran kegiatan di Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah.

Dari beberapa faktor pendukung adanya Majelis Ta'lim dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pohijo, seharusnya dukungan tersebut bisa memotivasi masyarakat agar bisa lebih berkembang lagi. Banyak faktor internal dan eksternal yang sudah dimiliki desa maupun individunya membuat adanya Majelis Ta'lim dan kegiatan pemberdayaan dapat semakin mudah memberikan akses kepada masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik.

Mengembangkan sebuah desa dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar lebih maju bukanlah hal yang mudah, tetapi juga terkadang harus melalui berbagai hal yang dapat menghambat kegiatan pemberdayaan desa tersebut. Adapun beberapa faktor penghambat dalam kegiatan pemberdayaan ini diantaranya adalah:

Pertama, kurangnya akses jaringan dengan masyarakat luar. Penduduk Desa Pohijo tidak semuanya melakukan hubungan dengan masyarakat luar. Jauhnya letak desa dengan kota menjadi salah satu penyebab lambatnya tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat, meskipun canggihnya media sosial yang sudah tidak diragukan lagi. Hal ini mengakibatkan masyarakat terasing dan terkurung dalam pola-pola yang sempit dan lama. Selain itu mereka cenderung tetap mempertahankan tradisi yang tidak mendorong kearah kemajuan.

Kedua, sebagian masyarakat masih mempertahankan tradisi lama. Masih banyak masyarakat Desa Pohijo yang menganggap tradisi tak dapat diubah secara mutlak dan hal itu mengakibatkan terhambatnya perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Banyak masyarakat tidak bersedia menerima inovasi dari luar. Padahal, inovasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan dalam suatu masyarakat.

Ketiga, ketergantungan (*dependence*). Adanya sifat saling ketergantungan terhadap orang lain dapat menyebabkan proses "pemandirian" masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama (misalnya terhadap pendamping sosial). Seperti yang telah disebutkan di awal bahwa tujuan dari kegiatan pemberdayaan ini tak lain agar masyarakat dapat mandiri dan berdaya. Dengan adanya

pelatihan dan cara untuk menumbuhkan keterampilan masyarakat diharapkan mampu untuk menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat bahwa mereka bisa dan mampu mandiri, meski masih terasa sulit untuk sekarang.

Kecempat, sarana dan prasarana. Karena letak Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah berada di pinggir jalan raya membuat tidak adanya lahan untuk parkir pada saat pelaksanaan pengajian rutin bulanan. Banyaknya jumlah jama'ah yang mengikuti pengajian akhirnya terpaksa parkir kendaraan di lahan dan pekarangan rumah tetangga Majelis Ta'lim dan di pinggir jalan yang membuat jamaah kurang nyaman serta was was terhadap kendaraan masing-masing.

Dari beberapa penjelasan mengenai kendala dalam program pemberdayaan, perlu dicermati bahwa kendala-kendala tersebut mungkin saja terjadi sekaligus dalam suatu program pemberdayaan, tetapi bisa juga hanya satu atau dua kendala yang timbul. Ada faktor-faktor yang relatif mudah untuk diatasi namun ada beberapa faktor yang cukup sulit untuk dirubah.

Dalam faktor penghambat yang relatif mudah dan cepat untuk diatasi, misalnya masalah sarana dan prasarana untuk parkir jama'ah. Pengurus Majelis Ta'lim memang tidak menyangka kalau jama'ahnya bisa mencapai dua ribuan dan selalu hadir di setiap pengajian rutin, namun hal-hal kecil seperti ini seharusnya dipikirkan terlebih dahulu. Langkah awal pengurus mengadakan pertemuan khusus untuk membahas beberapa hal yang bisa membuat kegiatan di Majelis Ta'lim sedikit memiliki masalah, entah dari kegiatan pemberdayaan atau kegiatan lain, agar semua bisa berjalan dengan baik. Dengan membeli lahan dan sesegera mungkin membangunkan pagar khusus untuk parkir para jama'ah.

Untuk faktor penghambat yang cukup sulit untuk dirubah, misalnya kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. Jauhnya letak desa dengan Kota Ponorogo membuat masyarakat enggan untuk harus selalu kesana. Namun dengan adanya internet atau sosial media, harusnya masyarakat sudah bisa mengakses informasi apapun disana. Jika faktor utama karena masyarakat yang malas, seharusnya Pemerintah Desa memberikan sosialisasi terkait dengan masalah desa atau informasi penting yang urgen. Selain itu, terdapat faktor penghambat yang membuat masyarakat tergantung dengan individu lain. Contohnya, masyarakat yang menjadi buruh sering kali cenderung menunggu orang yang membutuhkan jasanya. Kecenderungan ini membuat sebagian mereka menjadi

cenderung tidak mandiri. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, diharapkan masyarakat bisa mengambil ilmu dan bisa dipraktekkan dirumah dengan membuka usaha sendiri.

Faktor penghambat lain yang lumayan sulit dihilangkan adalah masih adanya masyarakat yang menganggap tradisi tidak dapat diubah secara mutlak. Pemerintah Desa khususnya RT atau RW bisa secara berkala memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai inovasi atau cara yang seharusnya ditinggalkan atau tidak untuk menuju perubahan sosial ke arah yang lebih baik, agar masyarakat tidak *stagnan*, lulus sekolah langsung bertani. Sosialisasi tentang inovasi dan perkembangan teknologi bisa merubah masyarakat desa walaupun bertani bisa dilakukan dengan cara modern, atau bisa bersekolah tinggi dan bisa mengembangkan desa lebih baik lagi dan sebagainya.

KESIMPULAN

Pola/pola pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pohijo melalui Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah yaitu *pertama*, membangun kesadaran ekonomi masyarakat. *Kedua*, penguatan kapasitas. *Ketiga*, pendayaan, dalam hal ini pengurus memberikandaya dan kekuatan kepada target yang disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang dimiliki masyarakat. Dalam kegiatan pemberdayaan ini, menggunakan pendekatan *buttom up*, di mana semua dilakukan atas dasar inisiatif masyarakat sendiri, yakni dengan membangun kesadaran serta dapat menumbuhkan motivasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi, kemudian membangun penguatan kapasitas bagi anggota pemberdaya dari Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah untuk diberikan pelatihan dan pendampingan oleh pengurus serta penanggungjawab kegiatan itu. Sementara, strategi pemberdayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pohijo melalui Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah yaitu Strategi dengan Aras Mezzo.

Beberapa faktor yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Pohijo adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam terlibat dan mengikuti berbagai kegiatan di Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah, kondisi fisik desa yang subur dan suhu lingkungan yang cocok untuk usaha tani holtikultural, loyalnya jama'ah dan masyarakat terhadap Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah, adanya tuntutan dari jamaah dan anggota pemberdayaan untuk mengadakan pelatihan yang menunjang kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat di Majelis

Ta'lim, letak Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah yang strategis serta waktu yang kondisional membuat masyarakat nyaman dengan kegiatan pemberdayaan ini, serta adanya dukungan dari pemerintah daerah dengan adanya bantuan dana untuk kelancaran kegiatan di Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah. Sementara, faktor yang menghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Pohijo adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat luar, sikap masyarakat yang masih mempertahankan tradisi sehingga mengakibatkan terhambatnya perubahan sosial dalam masyarakat, adanya sifat saling ketergantungan terhadap orang lain sehingga dapat menyebabkan proses "pemandirian" masyarakat membutuhkan waktu yang lama, serta kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Teguh. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018).
- Auliyah, Robiatul. "Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan." *Jurnal Studi Manajemen* 8, no. 1 (2014).
- Bakri, Maskuri. *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan RRA Dan PRA*. Surabaya: Visipress Media, 2017.
- Hakim, Imamul. "Muhammadiyah's Framework on The Community Economic Empowerment." *Falah Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2018).
- Helmawati. *Pendidikan Nasional Dan Optimalisasi Majelis Ta'lim*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Khazin. *Jejak-Jejak Pendidikan Islam Di Indonesia*. Bandung: Penerbitan Muhammadiyah Malang, 1996.
- Legi, Riedel, W.Y. Rompas, and Jericho D. Pombengi. "Implementasi Pendekatan Butttom-Up Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Pembangunan* 1, no. 10 (2015).

- Machhendrawaty, Nanih, and Agus Ahmad Syafe'i. *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muslim, Azis. "Economic Community Empowerment Through Tourist Village Development." *Mimbar* 32, no. 2 (2016).
- Muslim, Aziz. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muzakki, Hawwin. *SISTEM PENILAIAN PEMBELAJARAN Teori Dan Praktik*. Malang: Madani Media, 2019.
- Natsir, Ahmad, Hawwin Muzakki, and Muchlis Daroini. "Posdaya Berbasis Pesantren: Pelatihan Manajemen Madrasah Dan Pengelolaan Kelas Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an 'Hasan Munadi Pohsawit' Ponorogo." *Indonesian Engagement Journal*. Vol. 1, November 2, 2020. <https://doi.org/10.21154/INEJ.V1I2.2329>.
- Payne. *Modern Social Work Theory*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Pratama, Crisvi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho Di Lereng Gunung Wilis." *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 1, no. 1 (2013).
- Sarjana, Sunan Autad, and Iza Hanifudin. "Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik: Sebuah Alternatif Pemberdayaan Tanah Wakaf." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sriharini. "Pembangunan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembangunan Berkelanjutan." *JURNAL PMI : Media Pemikiran Dan Pengembangan Masyarakat* 4, no. 1 (2006).
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sujarwo. *Strategi Pembelajaran Orang Dewasa*. Jakarta: Pemakalah Dosen Jurusan PLS FIP UNY, n.d.
- Sulistiyani. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Gava Media, 2004.

Syafic'i, Agus Ahmad. *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2001.

Trisnawati. "Community Development for Coastal Society Based on Islamic Values in Tanjung Village Pademawu Pamekasan." *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 25, no. 1 (2017).